



# PROFIL GENDER

TAHUN

2025

BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA SURABAYA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya 1 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Ir. Irvan Wahyudrajad, M.MT.

Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 196802151994031008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan .....	1
1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG .....	2
BAB II PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG .....	4
2.1 Gambaran Umum .....	4
2.2 Visi, Misi dan Motto .....	4
2.3 Demografi .....	5
2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.....	7
BAB III PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH.....	11
3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) .....	11
3.2 Pelaksanaan .....	14
3.3 Pemantauan dan Evaluasi .....	17
3.4 Pengawasan .....	17
3.5 Pelaporan.....	17
BAB IV TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA .....	18
4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb) .....	18
4.2 Kesimpulan .....	18
4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran	
18	
BAB V INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.....	20



5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan .....	20
BAB VI PENUTUP.....	22

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG .....	9
Tabel 2.2 Presentase SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG .....	9
Tabel 2.3 Data Terpilih Bappedalitbang Kota Surabaya Tahun 2025.....	10
Tabel 3.1 Anggaran Responsif Gender.....	14
Tabel 3.2 Output Pendukung Pemberdayaan Perempuan Bappedalitbang Kota Surabaya .....	14

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .....	7
Gambar 4.1 Diagram Fishbone .....	18



## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun



2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender uang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi



percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)

2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practice*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025



## BAB II

# PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

### 2.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.2 Visi, Misi dan Motto

#### a. Visi

Visi Pemerintah Kota Surabaya 2025 - 2029 ialah “Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan” Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Surabaya mampu berperan dalam perubahan yang terjadi lingkup regional, nasional maupun global.

#### b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2025 - 2029 yakni sebagai berikut:



1. Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan, Tranformasi Sektor Ekonomi Unggulan yang Berdaya Saing Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Akses Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita dengan sasaran Meningkatnya Efisiensi Investasi Daerah, Meningkatnya Produktifitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Unggulan, Tercukupinya Kebutuhan Pangan Masyarakat, Terkendalinya Harga Keputuhan Pokok Masyarakat, Meningkatnya Kontribusi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi.
2. Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter, Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang berkualitas dengan sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Meratanya Kualitas Pendidikan, Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Keolahragaan
3. **Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan Sasaran Meningkatnya Manajemen Riset dan Inovasi, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Akuntabel dan Pelayanan Prima bagi Masyarakat, Meningkatnya Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah, meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel, Optimalnya Tata Kelola Pemerintah berbasis Elektronik**
4. Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, Meningkatnya Keseimbangan dan Kesinambungan Pembangunan Yang Berkelanjutan
5. Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Terwujudnya Kesejahteraan sosial yang Inklusif, Terciptanya Masyarakat maju dan Berbudaya Dalam Mewujudkan Kondusifitas Wilayah.

Sesuai dengan dokumen Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029 Bappedalitbang mengampu misi 3 yaitu Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dan bidang urusan yang diampu yaitu Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

### 2.3 Demografi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Surabaya merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

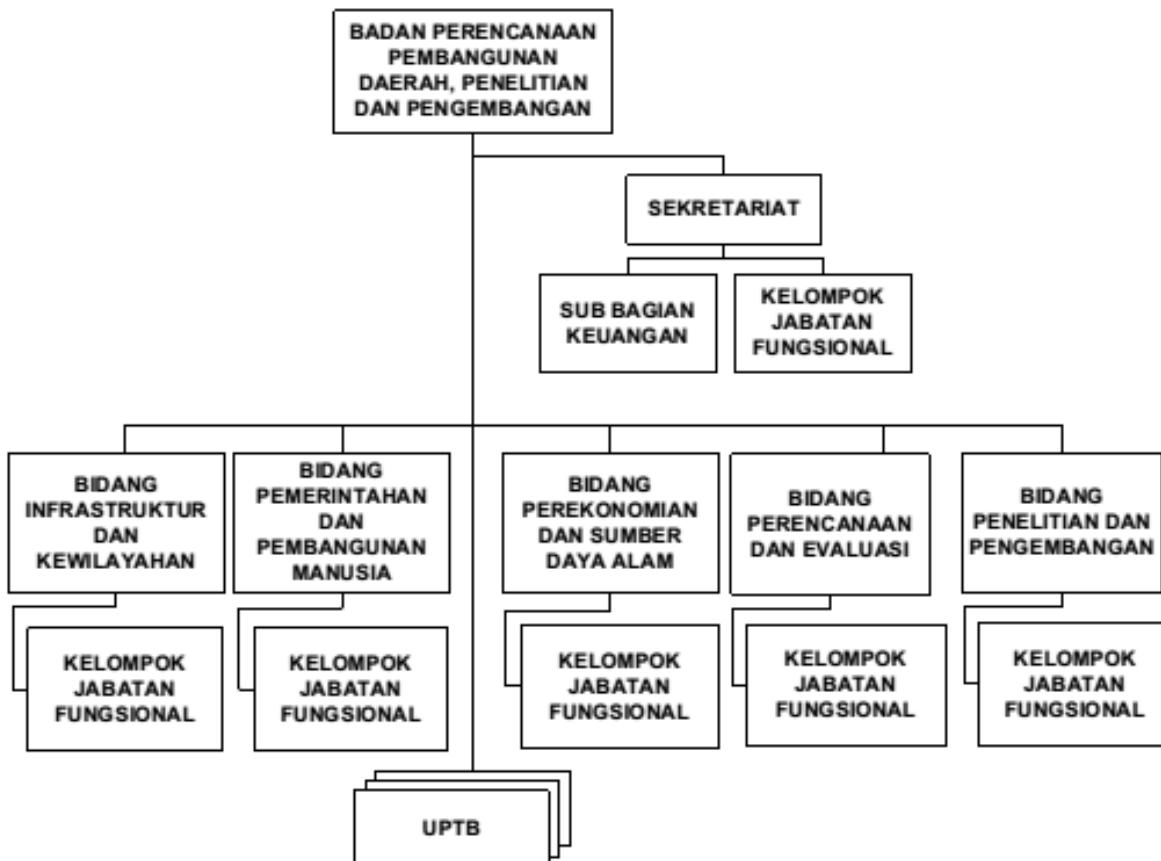


mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, yang terdiri dari:

- a. Badan;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. UPTB;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 125 (Seratus Dua Puluh Lima) pegawai dengan uraian sebagaimana berikut:

a. Menurut Status Kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 77 Orang
  - Non PNS : 48 Orang
- Total : 125 Orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) : 19 Orang
- Sarjana (S1) : 82 Orang
- Diploma-IV (D-IV) : 1 Orang
- Diploma III (D-III) : 2 Orang
- SMA : 15 Orang
- SMP : 5 Orang

## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

Dalam rangka upaya implementasi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, diperlukan adanya pola kebijakan yang diintegrasikan melalui komponen



perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya tertuang pada:

- a. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- b. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/160/436.1.2/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/221/436.1.2/2022 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.
- d. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Nomor 800/8/436.8.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025.
- e. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2024 Tentang Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) Kartini Kota Surabaya.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut: [Kebijakan PUG](#)

#### **2.4.2 Sosialisasi PUG**

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dibutuhkan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

- a. Internalisasi PUG (*Capacity Building* PUG dan PPRG) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pembahasan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Penganugerahan Parahita Ekapraya KEMENPPPA dan Database Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya Tahun 2025.
- c. Diklat Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG) Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



Manusia Kota Surabaya bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut: [Sosialisasi PUG](#)

#### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

##### a. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG

**Tabel 2.1  
SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Feriz Andrian Saputro, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terdapat sertifikat pelatihan
2	Sudiono Teguh Prabaya, S.Ak.	Perencana Ahli Pertama	Terdapat sertifikat pelatihan
3	Mochamad Rizaldy Rachmansyah, M.M	Peneliti Ahli Pertama	Terdapat sertifikat pelatihan
4	Anggia Chanza Widowati S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	Terdapat sertifikat pelatihan

**Tabel 2.2  
Presentase SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG**

Jumlah SDM Bapeddalitbang	Jumlah Terlatih	%
125	4	0,032%

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut: [SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG](#)

##### b. Focal Point PUG

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Nomor 800/8/436.8.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025.

Jumlah Tim Focal Point	Keterangan
19	Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Ketua Tim Kerja

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut: [Focal Point PUG](#)

#### 2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia dan data terpilah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025 yaitu:



**Tabel 2.3**  
**Data Terpilah Bappedalitbang Kota Surabaya Tahun 2025**

No	Jenis Kegiatan	ASN/Non ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1	Kepala Badan	ASN	1	0	1
2	Sekretaris Badan	ASN	1	0	1
3	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	ASN	0	1	1
4	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	ASN	0	1	1
5	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	ASN	0	1	1
6	Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	ASN	1	0	1
7	Kepala Bidang Perencanaan Dan Evaluasi	ASN	0	1	1
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	0	1	1
9	Ketua Tim Kerja Data Dan Evaluasi	ASN	0	1	1
10	Ketua Tim Kerja Infrastruktur	ASN	1	0	1
11	Ketua Tim Kerja Kewilayahan	ASN	1	0	1
12	Ketua Tim Kerja Pemerintahan	ASN	0	1	1
13	Ketua Tim Kerja Penelitian	ASN	0	1	1
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Inovasi	ASN	1	0	1
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan Manusia	ASN	0	1	1
16	Ketua Tim Kerja Perekonomian	ASN	0	1	1
17	Ketua Tim Kerja Perencanaan	ASN	0	1	1
18	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Alam	ASN	1	0	1
19	Ketua Tim Kerja Umum Dan Kepegawaian	ASN	1	0	1
20	Staf	ASN	28	30	58
21	Staf	NON ASN	33	15	48
<b>Jumlah</b>			<b>69</b>	<b>56</b>	<b>125</b>

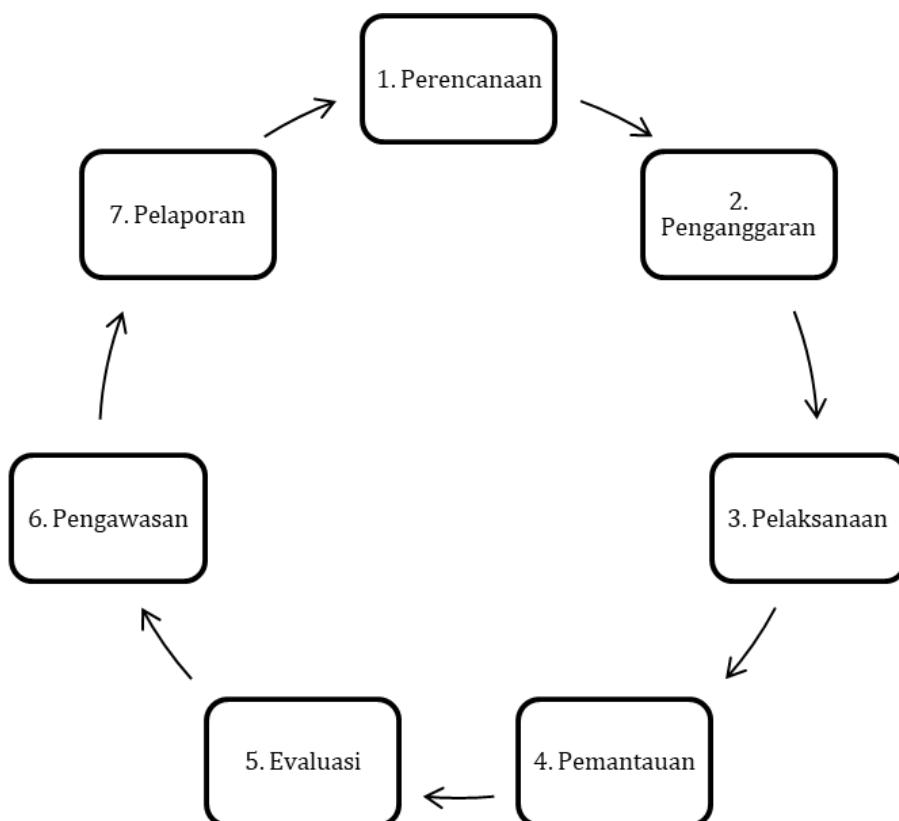
Adapun rincian data terpilah terdapat pada link berikut: [Data Terpilah](#)



## BAB III

# PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



### 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

#### 1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan



dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

- a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG  
Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Nomor 800/8/436.8.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025  
Link: [Focal Point PUG](#)
- b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender  
Renstra dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.  
Link: [Renstra dan Renja Bappedalitbang](#)
- c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP dan GAB)  
Dokumen perencanaan penganggaran responsif gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) adalah instrumen penting dalam penerapan Penganggaran Responsif Gender (ARG) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya. Program/ kegiatan/ sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya yang Responsif Gender pada Tahun 2025 sebanyak 11 sub kegiatan.  
Link: [PPRG Bappedalitbang 2025](#)
- d. Hasil Analisis Gender  
Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Pada tahun 2025 terdapat 11 sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya yang telah disusun GAP dan GAB.  
Link: [Hasil Analisis Gender Bappedalitbang 2025](#)
- e. Alat Analisis Gender  
Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :



- Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut jenis kelamin dan usia, baik kuantitatif maupun kualitatif (dari kelompok sasaran)
- Langkah ke-3 : Mengenal isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender internal
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender eksternal
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator kinerja gender

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya 2025-2029 yang selaras dengan
  - RPJMD Kota Surabaya 2025-2029
  - Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
  - Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
  - Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Nomor 800/8/436.8.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025
  - Dokumen GAP dan GAB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya

Data dukung sebagaimana link berikut :

- SK Tim Focal Point : [SK Tim Focal Point](#)



- Perencanaan Bappedalitbang : [Renja & Renstra](#)
  - PPRG Bappedalitbang : [GAP dan GAB](#)
- c. Anggaran Responsif Gender (GAP dan GAB) di Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Anggaran Responsif Gender**

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.202.234.115
2	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp724.979.118
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp541.895.744
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp770.796.780
5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp1.238.209.185
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp953.567.078
7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp910.078.712
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp681.139.077
9	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahuan	Rp874.011.112
10	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp4.460.423.181
11	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp1.095.409.708
<b>Total</b>		<b>Rp13.452.743.810</b>

### 3.2 Pelaksanaan

#### 3.2.1 Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)

**Tabel 3.2**

**Output Pendukung Pemberdayaan Perempuan Bappedalitbang Kota Surabaya**

No	Bidang	Kegiatan
1	Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa kebijakan politik dan anggaran di Kota Surabaya dibuat dengan mempertimbangkan perspektif gender. Ini termasuk meninjau anggaran agar alokasinya dapat memberdayakan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik.</li> <li>• Melibatkan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran yang berfokus pada pemberdayaan politik perempuan.</li> </ul>



No	Bidang	Kegiatan
2	Ekonomi	Pelatihan dan penguatan UMKM dalam program inkubasi UMKM
3	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakti Sosial</li> <li>• Penyaluran infaq ke Baznas</li> </ul>
4	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Pentingnya PUG dan KRPPA</li> <li>• Sosialisasi peran APH, PKBM dan Satgas</li> </ul>
5	Lainnya (Budaya dan Lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan penganggaran Penanganan Stunting</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran Penurunan Kemiskinan</li> </ul>

### 3.2.2 Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya antara lain Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya yang aktif ikut serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak perempuan, dan dukungan untuk usaha mikro.

### 3.2.3 Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan pembentukan Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, yang secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, serta bekerjasama menerapkan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

### 3.2.4 Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diakomodir dalam bentuk penyediaan fasilitas umum ramah perempuan dan anak yang bisa diakses untuk laki-laki, perempuan dan anak. Misal : toilet laki-laki dan perempuan.

### 3.2.5 Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diakomodir dalam bentuk kegiatan pelatihan Dharma Wanita yang memberikan



wawasan dan keterampilan bukan saja bermanfaat untuk personal tapi juga untuk peningkatan kualitas keluarga.

Misal : pelatihan memasak, *parenting* dan lain sebagainya

### **3.2.6 Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga**

Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3.2.7 Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait mekanisme Izin Pemakaian Rumah (IPR) yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait *Standart Operating Procedure* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **3.2.8 Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender**

Salah satu program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender adalah mewujudkan sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak dengan berbasis digitalisasi.

### **3.2.9 Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring**

Berdasarkan data yang ada, untuk saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan perempuan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya. Hal ini linier dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang *concern* terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak

### **3.2.10 Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memastikan semua pihak, tanpa memandang gender, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang aman dan nyaman berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing.

Link: [Sarana dan Prasarana Responsif Gender](#)

### **3.2.11 Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring**

Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam bentuk GAP dan GAB.



### 3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diatur dalam SK Focal Point

### 3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya bukan saja melibatkan unsur internal Perangkat Daerah tapi juga melibatkan unsur dari eksternal Perangkat Daerah. Adanya monitoring dan evaluasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai pada kegiatan pendampingan Inspektorat yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

### 3.5 Pelaporan

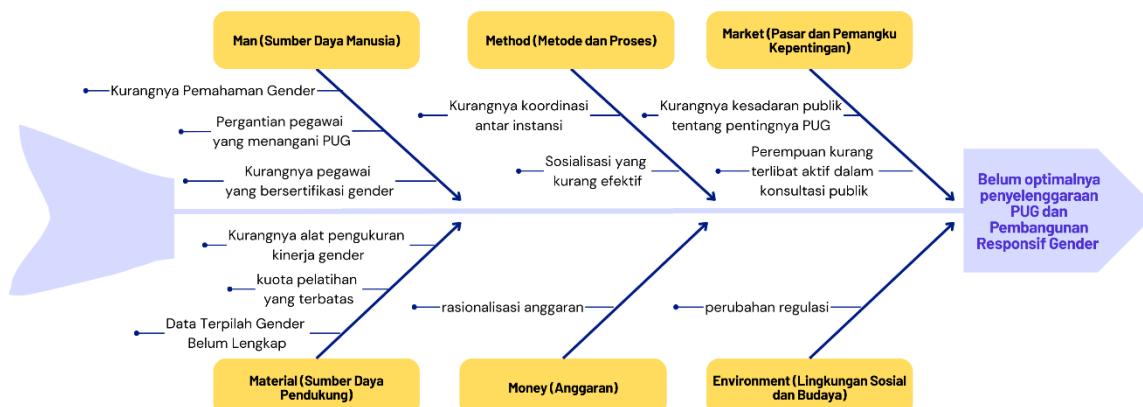
Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Nomor 800/8/436.8.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Tahun 2025. Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP dan GAB beserta Profil Gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.



## BAB IV

# TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

### 4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



Gambar 4.1 Diagram Fishbone

### 4.2 Kesimpulan

Belum optimalnya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pembangunan Responsif Gender disebabkan oleh faktor multidimensi yang saling terkait:

- Kurangnya pemahaman gender pada aparatur menyebabkan implementasi PUG hanya menjadi formalitas, tidak substantif.
- Sosialisasi yang kurang efektif membuat pemahaman gender di kalangan internal maupun masyarakat tidak merata.
- Kesadaran publik masih rendah terhadap pentingnya PUG, sehingga program tidak mendapat dukungan luas.
- Perubahan regulasi terkadang tidak konsisten dan dapat melemahkan keberlanjutan kebijakan responsif gender.

### 4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan dan Rekomendasi/Saran

Yang sudah dilaksanakan:

- Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender
- Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan
- Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender
- Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender



- e. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender

Rekomendasi /saran:

- a. Mengembangkan sistem informasi gender yang memuat data terpisah secara real-time untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.
- b. Menjalin kerja sama dengan LSM, akademisi, sektor swasta, dan media untuk memperluas jangkauan implementasi PUG.
- c. Memberikan reward atau penghargaan bagi instansi/daerah yang berhasil mengimplementasikan PUG dengan baik.
- d. Melakukan edukasi berbasis budaya lokal agar nilai kesetaraan gender lebih mudah diterima masyarakat.
- e. Membentuk kelompok kerja masyarakat (community based group) yang dapat memberi masukan langsung terhadap pelaksanaan PUG.



## BAB V

# INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

### 5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), *Issue Gender Kota Surabaya* antara lain:

#### a. INOVBOYO

Inovasi Kota Surabaya (INOVBOYO) adalah kompetisi inovasi tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG). Kompetisi ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovasi di Kota Surabaya, baik di lingkungan perangkat daerah maupun masyarakat umum. Melalui INOVBOYO, diharapkan muncul berbagai gagasan dan solusi kreatif yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Ajang ini menjadi wadah strategis bagi para inovator untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan kota melalui pemanfaatan teknologi, ide-ide solutif, dan pendekatan kolaboratif. INOVBOYO juga mendorong terjadinya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan sektor swasta dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Dengan adanya kompetisi ini, Pemerintah Kota Surabaya ingin membentuk ekosistem inovasi yang inklusif dan berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung bagi warga kota. INOVBOYO bukan sekadar lomba, melainkan bagian dari upaya mewujudkan Surabaya sebagai kota cerdas (*Smart City*) yang adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman.

#### Lampiran

1. SK PUG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya [SK Tim Focal Point](#)
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya



- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya tahun 2025, di Ruang Rapat Majapahit, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
- Musyawarah Rencana Pembangunan (Lansia, Disabilitas, Perempuan, dan Anak) di masing masing Kecamatan
- RAPERDA Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerinta Kota Surabaya bersama Panitia Khusus DPRD Kota Surabaya
- Rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Surabaya: Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
- Rapat pembahasan Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surabaya dengan BPS Kota Surabaya
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Program Review atas Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lansia melalui Posyandu Keluarga di Kota Surabaya bersama Koso Nippon
- Rapat Koordinasi Program Kerja DWP Bappedalitbang Surabaya
- Pembahasan Percepatan STBM 5 Pilar
- Pertemuan POKJA PUG Tahun 2025
- Inovasi Pengurangan Sampah Popok dan Pembalut sekali pakai bekerja sama dengan bumbi

Link Kegiatan: [Kegiatan RESPONSIF GENDER](#)

3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

Link: [Kegiatan Inovasi PUG](#)



## BAB VI

## PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak Tahun 2025